

P-ISSN: 1858-2168
E-ISSN: 2621-251X

JURNAL
**ADMINISTRASI
PUBLIK**

PUSLATBANG KMP LAN RI

VOLUME XIX NOMOR 2 DESEMBER 2023

Penanggung Jawab:

Dr. Andi Taufik, M. Si

Redaktur/Journal Editor:

Anita, S. Sos., M. Si

Mitra Bestari:

Prof. Dr. Abdul Mahsyar, M. Si

Prof. Dr. Haedar Akib, M. Si

Prof. Dr. Nurliah Nurdin., MA

Dr. Firdaus Muhammad, M.Si

Dr. Asropi S. IP, M. Si

Dr. Hayat, S.A.P., M.Si

Dr. Bevaola Kusumasari, M. Si

Dr. Rulinawaty, S. Sos., M. Si

Dr. St. Syamsudduha, M. Pd

Dr. Puji Lestari, M. Si

Editor:

Dr. Frida Chairunisa, M. Si

Dr. Halim, SH., MH

Dr. Johan Tarru Mada, M. Si

Milawaty, SS, MM

Syakib Arsalan, SH.I, LL.M

Penyunting/Section Editor:

Zaenal Z., S. Sos., M. Adm. Pemb.

Satria Eka Tri Laksana, S.IP

Copy Editor & Layout Editor:

Avrina Dwijayanti, S. IP.

Ayun Sri Damayanti, SH., MH

Nur Khasanah Latief, S. IP

Carmelia, S.E

St. Aflaha, S.E.

Desain Grafis:

Muhammad Iqbal, S. Sos., MA

Volume XIX Nomor 2 Desember 2023

JURNAL
**ADMINISTRASI
PUBLIK**
PUSLATBANG KMP LAN RI

Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan
Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KMP LAN)
Jl. Raya Baruga No. 48 Makassar, 90234
E-mail: jap@lan.go.id | URL: <http://makassar.lan.go.id/jap>

CALL FOR PAPER:

Redaksi menerima naskah hasil penelitian, analisis, kajian, pemikiran kritis, dan gagasan ilmiah dalam lingkup bidang administrasi publik yang belum diterbitkan di jurnal ilmiah lainnya. Naskah hendaknya diketik dalam MS Word menggunakan Bahasa Indonesia sepanjang 6000-8000 kata, ukuran A4, huruf Times New Roman ukuran 12 dan spasi 1,5. Abstrak ditulis dalam dwi bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) masing-masing sepanjang 100-200 kata. Naskah di-submit ke [http: <http://makassar.lan.go.id/jap>](http://makassar.lan.go.id/jap) atau dikirim melalui email ke Redaksi dalam bentuk soft file copy. Redaksi berhak melakukan penilaian dan penyuntingan terhadap naskah yang masuk. Naskah yang lolos seleksi akan di-review oleh Mitra Bestari (*Reviewer*).



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR
2023

JURNAL
**ADMINISTRASI
PUBLIK**

PUSLATBANG KMP LAN RI

Volume XIX Nomor 2 Desember 2023
Hal. 193-340

-
- | | |
|--|---------|
| 1. POTRET TEMUAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN: STUDI KASUS DANA TRANSFER KHUSUS DI PROVINSI JAWA BARAT
Andi Setyo Pambudi | 193-212 |
| 2. IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN SERANG NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN SERANG
Siska Rahma Vidianti, Ipah Ema Jumiati | 213-232 |
| 3. DISKRESI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CPNS DENGAN METODE <i>BLENDED LEARNING</i> (STUDI KASUS PELATIHAN DASAR CPNS KABUPATEN MAYBRAT)
Anisa Mifrohatun Fathiyah | 233-260 |
| 4. <i>COLLABORATIVE GOVERNANCE: TRUST BUILDING INDICATOR</i> DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA ALAM MENDATTE PARK DI KABUPATEN ENREKANG
Muhammad Hidayat Djabbari Hidayat, Khairil Amran, Dewi Sulfa Saguni | 261-275 |
| 5. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM PARKIR ELEKTRONIK (E-PARKING) DALAM MEWUJUDKAN SMART CITY DI KOTA MEDAN
Ivana Romasi, Mohammad Ridwan | 276-297 |
| 6. MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA TRANSFER KE DAERAH (DANA DESENTRALISASI)
Isti'anah, Eko Setiyo Utomo | 298-322 |

7. **STRATEGI PENDUKUNG SUMBER DAYA BADAN** 323-339
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TEBING
TINGGI DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI
KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA
Dinda Hayati, Wiro Oktavius Ginting

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

PUSLATBANG KMP LAN RI

P-ISSN: 1858-2168

E-ISSN: 2621-251X

Volume XIX Nomor 2 Desember 2023

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang berbahagia, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Jurnal Administrasi Publik berhasil memperoleh Akreditasi Sinta 4 sesuai dengan Surat Keputusan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Terima kasih kepada seluruh pembaca, mitra bestari, maupun penulis yang telah berkontribusi mengirimkan tulisan kepada redaksi.

Pada edisi ini, Jurnal Administrasi Publik menghadirkan 7 artikel yang secara keseluruhan merupakan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik. Tulisan pertama ditulis oleh Andi Setyo Pambudi dengan judul “Potret Temuan Implementasi Pembangunan Bidang Pendidikan: Studi Kasus Dana Transfer Khusus di Provinsi Jawa Barat”. Tulisan kedua berasal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Siska Rahma Vidiyanti, Ipah Ema Jumiati yang bertajuk “Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Serang”. Tulisan ketiga dihadirkan oleh Anisa Mifrohatun Fathiyah dengan judul “Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Pelatihan Dasar CPNS dengan Metode Blended Learning (Studi Kasus Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Maybrat)”. Tulisan keempat ditulis oleh Muhammad Hidayat Djabbari Hidayat, Khairil Amran, Dewi Sulfa Saguni yang diberi tajuk “*Collaborative Governance: Trust Building Indicator* Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Mendatte Park Di Kabupaten Enrekang”. Dalam tulisan kelima, Ivana Romasi, Mohammad Ridwan mencoba menuliskan hasil penelitiannya mengenai “Efektivitas Penggunaan Sistem Parkir Elektronik (*E-Parking*) Dalam Mewujudkan *Smart City* di Kota Medan”. Tulisan keenam dihadirkan oleh Isti’annah, Eko Setiyo Utomo yang mengambil judul “Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Transfer Ke Daerah (Dana Desentralisasi)”. Adapun tulisan ketujuh, ditulis oleh Dinda Hayati, Wiro Oktavius Ginting dengan judul “Strategi Pendukung Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi Dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Tebing Tinggi Kota”.

Redaksi Jurnal Administrasi Publik mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada penulis yang telah bersedia mengirimkan naskahnya kepada kami. Tidak lupa kami mengundang pembaca untuk berpartisipasi mengirimkan tulisan yang dimiliki untuk Jurnal Administrasi Publik edisi selanjutnya.

Semoga setiap tulisan yang ada di dalam jurnal edisi ini dapat menjadi motivasi, sumbangan ide, serta tambahan ilmu bagi seluruh pembaca. Salam inovasi.

Redaksi

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

PUSLATBANG KMP LAN RI

P-ISSN: 1858-2168

E-ISSN: 2621-251X

Volume XIX Nomor 2 Desember 2023

Lembar abstrak ini boleh diperbanyak/di-copy tanpa izin dan biaya

Andi Setyo Pambudi

Potret Temuan Implementasi Pembangunan Bidang Pendidikan: Studi Kasus Dana Transfer Khusus di Provinsi Jawa Barat

Jurnal Administrasi Publik Volume XIX Nomor 2 Desember 2023, Hal. 193-212

Bidang pendidikan adalah salah satu bagian penting pembangunan nasional yang pada hakikatnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam praktiknya, kebijakan pembangunan bidang ini diwujudkan dalam serangkaian program dan kegiatan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Hal yang menarik terkait isu ini dilapangan adalah kesenjangan fiskal. Upaya untuk menyeimbangkan ketimpangan fiskal di bidang Pendidikan dilakukan pemerintah pusat melalui perimbangan keuangan dalam bentuk dana transfer ke daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan reviu terhadap siklus perencanaan dan pelaksanaan dana transfer, terutama DAK untuk penugasan fisik bidang pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* (kualitatif dan kuantitatif) dengan data numerik baik sekunder maupun primer. Pengumpulan data diperoleh melalui *Focus Group Discussion*, *big data*, dan kuesioner. Pengolahan big data sebagai bagian analisis memanfaatkan aplikasi *Intelligent Media Monitoring* (IMM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan kemampuan sumber daya manusia pengelola dana transfer di daerah dalam menyusun proposal DAK masih sangat tinggi. Disparitas ini semakin nyata dengan perbedaan aksesibilitas informasi antara wilayah perkotaan dan perdesaan, penentuan alokasi anggaran yang belum sepenuhnya mencerminkan besarnya kebutuhan akreditasi sekolah, serta kurangnya transparansi dan audit publik dalam pengelolaan dana perimbangan terkait pendidikan. Oleh karena itu berbagai terobosan sejak aspek perencanaan dan pelaporan diperlukan, termasuk juga strategi pelaksanaan yang adaptif terhadap ragam kondisi masyarakat, kondisi geografis dan sumber daya pengelola dana transfer bidang pendidikan di daerah.

Kata kunci: Dana Transfer; Pendidikan; Kebijakan; *Big Data*

Siska Rahma Vidiанти, Ipah Ema Jumiaty

Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Serang

Jurnal Administrasi Publik Volume XIX Nomor 2 Desember 2023, Hal. 213-232

Stunting merupakan isu prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada RPJMN tahun 2020-2024 yang memiliki target angka prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Serang telah menggencarkan untuk melakukan percepatan pencegahan stunting dengan dibuatnya Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021, karena masih adanya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya dan tingginya angka prevalensi stunting yang masih belum bisa mencapai target nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Serang dan menggunakan teori model implementasi menurut Van Metter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Adanya kendala tersebut karena masih tingginya angka prevalensi stunting SSGI di Kabupaten Serang tahun 2022 yakni sebesar 26,4% yang masih jauh dari target yang ditetapkan, pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang masih terbatas di beberapa aspek, minimnya ketersediaan alat antropometri di posyandu wilayah puskesmas, masih adanya perilaku masyarakat yang sulit dirubah saat melakukan aktivitas sehari-hari di sekitar aliran sungai dan kurangnya pengawasan terhadap bantuan jamban sederhana.

Kata kunci: Implementasi; Peraturan Daerah; Pencegahan Stunting

Anisa Mifrohatun Fathiyah

Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Pelatihan Dasar CPNS dengan Metode *Blended Learning* (Studi Kasus Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Maybrat)

Jurnal Administrasi Publik Volume XIX Nomor 2 Desember 2023, Hal. 233-260

Dalam teori *bottom-up* implementasi kebijakan, diskresi disebut sebagai cara yang dapat ditempuh oleh birokrat garda terdepan agar kebijakan dapat berjalan secara efektif dan menunjang keberhasilan kebijakan. Diskresi ini yang kemudian diterapkan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KMP) dalam melaksanakan kebijakan Pelatihan Dasar CPNS dengan metode *blended learning* bagi CPNS Kabupaten Maybrat. *Blended learning* yang seharusnya dilakukan melalui tiga fase pembelajaran, dijalankan hanya dengan dua fase pembelajaran, dan kurikulum yang digunakan pun adalah kurikulum pelatihan secara klasikal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk melihat bagaimana diskresi dilakukan dalam implementasi kebijakan Pelatihan Dasar CPNS dengan metode *blended learning* menggunakan konsep konten dan konteks kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga pihak yang kepentingannya terpengaruh dengan adanya kebijakan yaitu CPNS peserta pelatihan, pemerintah daerah dan Puslatbang KMP menjadi pihak yang mendapatkan manfaat dan merasakan perubahan dengan dilaksanakannya diskresi kebijakan Pelatihan Dasar CPNS. Kebijakan dipusatkan pelaksanaannya di Poksi Pelatihan dan Pengembangan, dimana sumber daya keuangan dan sarana prasarana penunjang pelatihan sepenuhnya dalam tanggung jawab BKPSDM Kabupaten Maybrat. Strategi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh CPNS dan Pemerintah Daerah. Dari sisi penerimaan dan kepatuhan, kebijakan dinilai

dapat diterima dan dilaksanakan dengan dengan baik meskipun penyelenggaraan dirasa cukup berat dari sisi metode pembelajaran.

Kata kunci: Pelatihan Dasar CPNS; *Blended Learning*; Diskresi Kebijakan

Muhammad Hidayat Djabbari, Hidayat, Khairil Amran, Dewi Sulfa Saguni

Collaborative Governance: Trust Building Indicator Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Mendatte Park Di Kabupaten Enrekang

Jurnal Administrasi Publik Volume XIX Nomor 2 Desember 2023, Hal. 261-275

Membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi pengembangan potensi pariwisata merupakan langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara memanfaatkan daya tarik pariwisata dan pemeliharaan daya tarik pariwisata yang berkelanjutan dengan memastikan bahwa proses kolaborasi antar entitas yang terlibat merasa aman dan nyaman didalam proses kolaborasi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis menganalisis *trust building indicator* dalam proses kolaborasi untuk pengembangan objek wisata alam Mendatte Park. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang dianalisis secara deskriptif berdasarkan data yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data melalui proses wawancara, observasi lapangan, dan melihat dokumen-dokumen. Adapun data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan beberapa tahapan, yakni: *data reduction, data display dan conclusion drawing/verification*. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, Adapun informan dalam penelitian ini adalah 1) Dinas Pariwisata Kabupaten Enrekang; 2) Kepala Desa Mendatte; 3) Pengelola (BUMDes Makinawa Mendatte); 3) Penyedia jasa penginapan dan rumah makan (Villa Bambapuang); dan 4) Pengunjung objek wisata alam Mendatte Park. Hasil penelitian menunjukkan proses *collaborative governance* dengan menggunakan *indikator trust building* (membangun kepercayaan) di objek wisata alam Mendatte Park dilakukan dengan membangun proses komunikasi formal dan informal yang yang mengedepankan hubungan yang setara serta saling menghargai antar stakeholder. Proses membangun kepercayaan antar stakeholder dipengaruhi oleh beberapa indikator, yakni proses komunikasi, komitmen antar stakeholder, visi bersama, dan dampak yang dihasilkan dari proses kerjasama.

Kata kunci: *Collaborative Governance*; Kepercayaan; Pariwisata; Mendatte Park

Ivana Romasi, Mohammad Ridwan

Efektivitas Penggunaan Sistem Parkir Elektronik (*E-Parking*) Dalam Mewujudkan Smart City di Kota Medan

Jurnal Administrasi Publik Volume XIX Nomor 2 Desember 2023, Hal. 276-297

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan sistem parkir elektronik dalam mewujudkan *smart city* di Kota Medan. Parkir merupakan permasalahan yang sangat kompleks di Kota Medan khususnya dari segi pengelolaannya, sehingga Pemerintah Kota Medan berinovasi untuk meningkatkan pengelolaan parkir dari manual menjadi elektronik melalui Program *E-Parking* yang diresmikan pada tanggal 18 Oktober 2021. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum meratanya penerapan sistem *e-parking* pada jalan-jalan yang telah diterapkan *e-parking* serta melihat kesesuaian penerapan program *e-parking* dengan konsep *smart city*. Permasalahan yang muncul

dalam pemanfaatan *e-parking* di Kota Medan yaitu pemanfaatan *e-parking* belum merata digunakan oleh masyarakat, petugas parkir masih bingung menggunakan alat, petugas parkir elektronik masih memungut uang tunai, perubahan pendapatan daerah, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti melakukan wawancara terhadap sejumlah informan Dinas Perhubungan Kota Medan seperti Inspektur Muda Keselamatan Transportasi Jalan, Kepala Seksi Parkir Wilayah II, dan Petugas Parkir. Peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat dan petugas parkir elektronik di kota Medan. Selain itu peneliti melakukan observasi, dokumentasi, dan studi literatur.

Kata Kunci: *Smart City*; Sistem Parkir Elektronik; Efektivitas Program

Isti'anah, Eko Setiyo Utomo

Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Transfer Ke Daerah (Dana Desentralisasi)

Jurnal Administrasi Publik Volume XIX Nomor 2 Desember 2023, Hal. 298-322

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengatur desain baru dana transfer ke daerah, pendapatan dan belanja daerah. Begitu juga diatur cara memonitor dan memberikan evaluasi belanja daerah agar setiap anggaran yang ada, dapat digunakan secara efektif dan efisien. Kementerian keuangan terus berupaya memecahkan dan mengikis celah penyalahgunaan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sekaligus mencari keselarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah. Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengevaluasi tingkat transparansi dan akuntabilitas transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) melalui pengelolaan rekening kas dan menilai kualitas manajemen pengelolaan kas pemerintah serta juga mengevaluasi pengelolaan rekening pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data primer sekunder yang berasal dari berbagai literatur. Dari tahun 2019 hingga 2021 bahkan perkiraan akhir 2022 dana transfer yang mengendap di rekening Pemda seluruh Indonesia pada bank-bank daerah rata-rata mencapai Rp 100 triliun lebih. Pengendapan dana akan mengganggu pembangunan dan aktivitas pelayanan publik. Padahal yang diharapkan adanya realisasi belanja pemerintah yang merupakan stimulus utama pergerakan perekonomian daerah. Dengan bergabungnya pemda dalam *Treasury Single Account (TSA)*, semua aspek mobilisasi sumber daya keuangan dan pengeluaran dapat dikelola secara keseluruhan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Selain memperkokoh sekaligus menjawab tantangan keterbatasan sumber daya keuangan pemerintah. *Idle cash* yang ada bisa mendatangkan penghasilan. Keikutsertaan pemda dalam implementasi TSA tidak mengurangi otonomi yang sudah diamanahkan.

Kata kunci: Dana Transfer; Kas; Rekening; Transparansi

Dinda Hayati, Wiro Oktavius Ginting

Strategi Pendukung Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi Dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Tebing Tinggi Kota

Jurnal Administrasi Publik Volume XIX Nomor 2 Desember 2023, Hal. 323-339

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya dan strategi pendukung sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tebing Tinggi dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Juga mendeskripsikan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan strategi tersebut. Bentuk penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diperoleh dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan salah satu teori strategi yang dikemukakan oleh Jack Koteen (1997) yakni strategi pendukung sumber daya yang indikatornya terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan sumber daya finansial. Juga berfokus pada faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan strategi tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pendukung sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tebing Tinggi dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi Kota sudah terlaksana dengan cukup baik namun belum bisa dikatakan optimal. Adapun strategi yang telah dilakukan adalah membuat bangunan pengendali banjir seperti bronjong, tanggul dan tembok penahan serta melakukan koordinasi antar lintas pemerintah. Salah satu faktor pendukung pelaksanaan strategi ini adalah adanya sinergitas antar lintas pemerintah. Namun, ada beberapa faktor penghambat yang ditemukan yakni terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM, finansial, dan sarana pendukung lainnya serta kultur masyarakat yang masih apatis. Sehingga, dalam penelitian ini peneliti merekomendasikan untuk perlu dilakukan pengajuan penambahan anggaran kepada kepala daerah guna memenuhi fasilitas pendukung penanggulangan bencana, sosialisasi kepada masyarakat dan perlu adanya peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan.

Kata Kunci: Strategi Pendukung Sumber Daya; Manajemen Bencana; Banjir

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

PUSLATBANG KMP LAN RI

P-ISSN: 1858-2168

E-ISSN: 2621-251X

Volume XIX Nomor 2 December 2023

The abstract sheet may be reproduced/copied without permission or charge.

Andi Setyo Pambudi

A Portrait of the Findings of the Implementation of Development in the Education Sector: A Case Study of the Special Transfer Funds in West Java Province

Jurnal Administrasi Publik Volume XIX Nomor 2 December 2023, Page 193-212

The education sector is an essential part of national development, essentially carried out to improve the quality of human resources. In practice, development policies in this field manifest in a series of programs and activities involving central and regional governments. The exciting thing related to this issue is the fiscal gap. The central government works to balance fiscal inequality in the education sector through financial balancing through the regional transfer funds. This study aims to review the cycle of planning and implementing transfer funds, especially Special Allocation Funds for physical assignments in the education sector in Indonesia. This study uses a mixed method approach (qualitative and quantitative) with both secondary and primary numerical data. Data collection was obtained through Focus Group Discussions, big data, and questionnaires. Big data processing utilizes the Intelligent Media Monitoring (IMM) application as part of the analysis. The study results show that the gap in the ability of human resources to manage transfer funds in the regions in preparing proposals is still very high. This disparity is increasingly evident with differences in information accessibility between urban and rural areas, the determination of budget allocations that do not fully reflect the magnitude of the need for school accreditation, and the lack of transparency and public audits in the management of balance funds related to education. Therefore, various breakthroughs from the planning and reporting aspects are needed, including an implementation strategy that is adaptive to the diverse conditions of society, geographical conditions, and resources for managing transfer funds in the education sector in the regions.

Keywords: *Transfer Funds; Education; Policy; Big Data*

Siska Rahma Vidiанти, Ipah Ema Jumiati

Implementation of Regulation of the Regent of Serang Regency Number 40 of 2021 Concerning the Acceleration of Integrated Stunting Prevention in Serang Regency

Jurnal Administrasi Publik Volume XIX Nomor 2 December 2023, Page 213-232

Stunting is a national priority issue that has been set by the government in the 2020-2024 RPJMN which has a target of a stunting prevalence rate of 14% in 2024. The Serang

District Government has intensified efforts to accelerate stunting prevention by enacting Regent Regulation Number 40 of 2021, because it is still there are problems that occur in its implementation and the high prevalence of stunting is still unable to reach the national target. The purpose of this study is to find out the implementation of Regent Regulation Number 40 of 2021 concerning the Acceleration of Integrated Stunting Prevention in Serang Regency and to use the theory of the implementation model according to Van Metter and Van Horn. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of this study indicate that it has been going well, but there are still some obstacles in its implementation. The existence of these obstacles is due to the high prevalence of SSGI stunting in Serang Regency in 2022 which is 26.4% which is still far from the target set, the understanding and knowledge of the community which is still limited in several aspects, the lack of availability of anthropometric tools at the posyandu in the puskesmas area, there are still people's behavior that is difficult to change when carrying out daily activities around the river and lack of supervision of simple latrine assistance.

Keywords: Implementation; Regional Regulation; Stunting Prevention

Anisa Mifrohatun Fathiyah

Discretion of Implementing Blended Learning Policy in The Basic Training for Prospective Civil Servants (A Case Study on The Basic Training for Prospective Civil Servants of Maybrat)

Jurnal Administrasi Publik Volume XIX Nomor 2 December 2023, Page 233-260

The bottom-up theory of policy implementation stated that discretion is a method taken by street-level bureaucrats to implement a policy effectively and successfully. This particular way is what The Center of Training and Development and Government Management Research of The National Institute of Public Administration (Puslatbang KMP) took to implement the blended learning policy in the basic training for prospective civil servants of Maybrat. The blended learning that supposedly underwent three learning phases, was done by two phases and used the classical training curriculum instead. This research used a qualitative approach to see how discretion happened during the implementation of blended learning policy for the basic training for prospective civil servants using Merilee Grindle's concept of policy content and policy context. The results showed that the prospective civil servants as the trainee, the local government, and Puslatbang KMP were the parties that got the benefits and experienced change from the discretion. The policy implementation was centralized in the Division of Training and Development, while the financial, facilities and infrastructure resources were under BKPSDM of Maybrat's responsibility. The strategies used during the policy implementation were made to adjust the prospective civil servants and local governments' condition. From the compliance and responsiveness, the policy was well-accepted and well-implemented even though there were some concerns about the chosen learning methods.

Keywords: Basic Training for Prospective Civil Servants; Blended Learning; Public Policy Discretion

Muhammad Hidayat Djabbari Hidayat, Khairil Amran, Dewi Sulfa Saguni

Collaborative Governance: Trust Building Indicator in Managing Mendatte Park Natural Tourism Object in Enrekang Regency

Building trust in the collaborative process of developing the potential of tourism is a crucial step in maintaining a balance between leveraging tourism attractions and preserving sustainable tourism attractions. This is achieved by ensuring that the collaboration process among involved entities feels secure and comfortable. The research objective is to analyze trust-building indicators in the collaboration process for the development of the natural tourist attraction Mendatte Park. The research method employs a qualitative approach analyzed descriptively based on data obtained through data collection techniques such as interviews, field observations, and document analysis. The collected data is then analyzed through several stages, namely: data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The informant selection technique uses purposive sampling, with informants including 1) the Tourism Office of Enrekang Regency; 2) the Head of Mendatte Village; 3) the Manager (BUMDes Makinawa Mendatte); 3) accommodation and restaurant service providers (Villa Bambapuang); and 4) visitors to Mendatte Park's natural tourist attraction. The results of the research indicate that the collaborative governance process, using trust-building indicators, in Mendatte Park's natural tourist attraction involves establishing formal and informal communication processes that prioritize equal relationships and mutual respect among stakeholders. The trust-building process among stakeholders is influenced by several indicators, including communication processes, commitment among stakeholders, shared vision, and the impacts resulting from the collaboration process.

Keywords: Collaborative Governance; Trust; Tourism; Mendatte Park

Ivana Romasi, Mohammad Ridwan

The Effectiveness of Use of Electronic Parking Systems (E-Parking) In Realizing Smart City In Medan City

The purpose of this study is to find out how effective the use of electronic parking systems is in realizing smart cities in Medan City. Parking is a very complex problem in Medan City, especially in terms of management, so the Medan City Government is innovating to improve parking management from manual to electronic through the E-Parking Program which was inaugurated on October 18, 2021. This research is motivated by the uneven implementation of the e-parking system on the roads where E-Parking has been implemented and seeing the suitability of the implementation of the e-parking program with the smart city concept. Problems that arise in the use of e-parking in Medan City, namely the use of e-parking has not been evenly used by the community, parking attendants are still confused about using e-parking tools, electronic parking attendants are still collecting cash, changes in local revenue, as well as facilities and infrastructure which is not sufficient. The research method used in this study is a qualitative research method with a descriptive approach. Researchers conducted interviews with a number of informants from the Medan City Transportation Agency, such as the Young Road Transportation Safety Inspector, Head of the Region II Parking Section, and Parking Officers. Researchers also conducted interviews with the public and electronic parking attendants in the city of Medan. In addition, researchers made observations, documentation, and literature studies.

Keywords: Smart City; Electronic Parking System; Program Effectiveness

Isti'anah, Eko Setiyo Utomo

Realizing Transparency and Accountability Transfer Funds to Regions

Jurnal Administrasi Publik Volume XIX Nomor 2 December 2023, Page 298-322

Law no. 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (HKPD) regulates the new design of transfer funds to regions, regional income and expenditure. Likewise, it regulates how to monitor and provide evaluation of regional spending so that any existing budget can be used effectively and efficiently. The Ministry of Finance continues to strive to solve and eliminate gaps in the misuse of transfer funds to regions and village funds (TKDD) while seeking harmony between central and regional fiscal policies. This research aims to evaluate the level of transparency and accountability of transfers to regional and village funds (TKDD) through cash account management and assess the quality of government cash management and also evaluate government account management in increasing government revenue. This research uses a qualitative descriptive method by utilizing secondary primary data originating from various literature. From 2019 to 2021, it is even estimated that by the end of 2022, transfer funds deposited in regional government accounts throughout Indonesia at regional banks will average more than IDR 100 trillion. Deposition of funds will disrupt development and public service activities. In fact, it is hoped that government spending will be realized, which is the main stimulus for regional economic movements. By joining regional governments in the Treasury Single Account (TSA), all aspects of financial resource mobilization and expenditure can be managed as a whole by the government for the benefit of the people. Apart from strengthening and responding to the challenges of limited government financial resources. Existing idle cash can generate income. Regional government participation in implementing TSA does not reduce the autonomy that has been mandated.

Keywords: Account; Cash; Transfer Fund; Transperancy.

Dinda Hayati, Wiro Oktavius Ginting

Resource Support Strategy of Tebing Tinggi City Regional Disaster Management Agency in Flood Management in Tebing Tinggi City District

Jurnal Administrasi Publik Volume XIX Nomor 2 December 2023, Page 323-339

This research aims to analyze how efforts and strategies support the resources of the Tebing Tinggi City Regional Disaster Management Agency (BPBD) in dealing with floods in Tebing Tinggi City District. Also describes what are the supporting and inhibiting factors in implementing the strategy. This form of research uses descriptive research methods with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation and documentation. Data was obtained and analyzed qualitatively using the approach of one of the strategy theories put forward by Jack Koteen (1997), namely a resource support strategy whose indicators consist of Human Resources (HR), infrastructure and financial resources. Also focuses on supporting and inhibiting factors in implementing the strategy. The results of this research indicate that the Tebing Tinggi City Regional Disaster Management Agency (BPBD) resource support strategy in managing flood disasters in Tebing Tinggi City District has been implemented quite well but cannot be said to be optimal. The strategy that has been implemented is to build flood control buildings such as gabions, embankments and retaining walls and carry out cross-

government coordination. One of the supporting factors for implementing this strategy is the existence of synergy between various governments. However, several inhibiting factors were found, namely the limited quantity and quality of human resources, finance and other supporting facilities as well as a society culture that was still apathetic. So, in this study the researcher recommends that it is necessary to submit additional budget proposals to regional heads to provide supporting facilities for disaster management, outreach to the community and the need to increase human resource capabilities through education and training.

Keywords: *Strategy Resource Suppor; Disaster Management; Flood*